

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang yang menganut sistim pemerintahan demokrasi 'Parlementer' atau dengan kata lain di sebut dengan "demokrasi barat". Sistim demokrasi barat adalah sebuah sistim demokrasi kelas borjuis. Istilah ini memang janggal jika dikaji dari pengertian demokrasi itu sendiri yang mengandung arti pemerintahan oleh rakyat, maka dalam sistim demokrasi burjois yang didukung oleh suatu kelas yang sekarang lazim disebut sebagai Kelas Menengah masih menjadi sebuah perdebatan yang panjang.

Ada beberapa penjelasan mengenai demokrasi kelas menengah, *pertama*, kita mengenal adanya sistem demokrasi langsung dan tak langsung. Demokrasi langsung biasanya hanya dalam teori saja, karena dewasa ini mayoritas negara-negara yang ada menggunakan demokrasi tak langsung sebab dalam sistim ini, rakyat membentuk pemerintahan dan memilih wakil-wakilnya dalam parlemen lewat pemilihan umum.

Kedua, walaupun merupakan kelompok elit namun kelompok itu dapat berganti dengan kelompok lain atau bukan kelompok elit saja yang dapat berkuasa tapi bisa juga kelompok militer, bangsawan, orang kaya yang pergantian ditentukan lewat sebuah pemilihan umum. *Ketiga*, walaupun kemudian ada kelompok kecil orang yang diberi wewenang dan legitimasi untuk menjalankan

pemerintahan, rakyat wajib untuk tunduk kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah dibuat oleh wakil-wakil mereka di parlemen dan rakyat berhak meminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan bahkan protes serta mengontrol pemerintahan sebagai bagian dari proses demokratisasi.

Rakyat terkadang kurang mengetahui hak-haknya sebagai warga negara, biasanya hal semacam ini terjadi pada negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Ketika kaum elit membentuk negara mereka hanya mengatasnamakan rakyat, sedangkan rakyat sendiri tidak mengetahui bagaimana konsep tentang negara itu sendiri. Ada banyak hal yang menyebabkan, misalnya : tingkat pendidikan yang masih rendah dan tidak merata, hanya sebagian rakyat yang mengetahui mengenai hak-haknya, apalagi menggunakan hak bahkan sampai harus dipertahankan ketika harus dirampas, dilanggar atau tidak dipenuhi. Sebenarnya demokrasi itu adalah sebuah sistem yang pemerintahan dalam masyarakat yang berpendidikan (modern). Dengan meluasnya pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maka orang yang sadar, makin banyak dengan demikian maka makin banyak pula orang yang berperan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Makin meningkatnya pendidikan rakyat maka terjadi ketidakpuasan di lapisan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka sebagai warga negara, maka akan timbul sebuah gejala baru dalam sistem demokrasi yang menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratisasi yang berlangsung. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah kehidupan demokratisasi.

Akibat dari tidak adanya partisipasi dalam proses demokratisasi maka sebagai Salah satu bentuk ungkapan dari kegelisan ini masyarakat mendirikan kelompok atau perkumpulan dan perhimpunan sukarela yang murni lahir dari sebuah kebutuhan yang berada di masyarakat. Gejala ini telah dilihat dan diidentifikasi oleh Alexis de Tocqueville (Raharjo ;1995) seorang pengamat Prancis yang berkunjung ke Amerika pada abad ke-19. Kelompok atau perkumpulan ini selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif selain itu mereka juga tampil sebagai lembaga pengimbang kekuatan negara.

Ada tiga macam peranan yang dijalankan oleh perkumpulan dan perhimpunan tersebut yakni *pertama* : mengambil dan menyiarkan pendapat serta rumusan kepentingan masyarakat yang kemudian berusaha agar supaya pendapat mereka dapat didengarkan oleh pemerintah. *Kedua* : menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat dari pada menggantung diri pada prakarsa negara. *Ketiga*: menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, yang menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama dengan demikian mencairkan sikap menyendiri serta membangkitkan tanggung jawab sosial yang luas. (Raharjo ;1995)

Perkumpulan dan asosiasi itulah yang sekarang ini sering di sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat atau dalam bahasa masyarakat moderen sering di katakan sebagai *Non Government Organization*, yang mana pada akhirnya disebut sebagai soko guru bagi masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan

yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat baik itu ekonomi, politik, sosial, kesehatan dan sebagainya.

Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan kehidupan demokratisasi rakyat yang terkadang banyak menyita banyak waktu dan dapat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Partisipasi masyarakat dalam negara khususnya negara-negara berkembang masih merupakan sebuah mimpi karena dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jalannya pemerintahan masih dipegang oleh kelompok kelas menengah tentunya hal ini sangat bertentangan dengan pengertian dari demokrasi.

Banyak sekali pengertian yang mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian dari keterlibatan masyarakat atau rakyat dalam sebuah proses demokratisasi di sebuah negara, salah satu di antaranya adalah masyarakat sipil. Pengertian mengenai masyarakat sipil sering membawa dampak negatif terhadap negara. Masyarakat sipil sering diartikan sebagai masyarakat yang berkeadaban, sadar dan mematuhi hukum dan memiliki sopan santun politik menurut tatanan yang disebut dengan demokrasi. (Raharjo ;1995) Selain itu juga masyarakat sipil merupakan suatu ide yang terus diperjuangkan manifestasinya agar pada akhirnya terbentuk suatu masyarakat yang bermoral, masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang beradab, atau terbentuk suatu tatanan sosial yang baik, teratur dan progresif. (Tagela Umbu;Kompas 19 Oktober 2000).

Di Indonesia gagasan mengenai masyarakat sipil mulai berkembang belakangan ini, hal ini sejalan dengan timbulnya perkembangan dan kesadaran dari masyarakat untuk melakukan gerakan – gerakan sosial yang mencoba menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara.

Dalam konteks Orde Baru kuatnya dominasi negara ini akibat dari adanya sistim yang dianut mengandung sistim otoriter, militerisme dan sentralistik, ini ternyata membawa dampak yang sangat berarti bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek dalam kehidupan sosio-politik ternyata hanya menjadi penonton dan bahkan hanya menjadi korban dari sebuah dominasi negara yang keras. Kemerdekaan, kebebasan masyarakat hanya menjadi sebuah *utopia* belaka karena pemerintah tidak pernah memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan serta mengekspresikan kebebasannya sebagai warga negara. Akibatnya keberadaan dari masyarakat sipil sama sekali hanya sebagai selongan belaka karena masyarakat harus berhadapan dengan kuatnya hegemoni negara.

Dengan melihat lemahnya posisi masyarakat yang berhadapan dengan negara maka perlunya suatu proses penyadaran mengenai hak-hak politik masyarakat agar supaya mereka berani untuk mengadakan posisi tawar dengan kekuasaan. Disinilah peran dari LSM sebagai sebuah kelompok oposisi yang berusaha dengan berbagai cara untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi tersebut tentunya dengan sasaran agar masyarakat dapat memahami mengenai

kenyataan yang sebenarnya sedang mereka hadapi yaitu telah terjadi pembelengguan hak-hak masyarakat sebagai warga negara.

B. PERUMUSAN MASALAH

Kuatnya dominasi yang diberikan oleh negara pada masa pemerintah ORBA membuat sendi-sendi kehidupan berdemokrasi menjadi lumpuh, akibatnya masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah kemiskinan sosio-politik yang berkepanjangan serta membuat masyarakat menjadi masyarakat yang miskin, masyarakat pinggiran yang bodoh secara historis, kultural dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dianggap sebagai subjek yang menentukan segalanya.

Berangkat dari permasalahan yang kompleks tersebut maka, penulis ingin melihat lebih jauh bagaimanakah model pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagai sebuah proses penyadaran kepada masyarakat mengenai hak-hak politik masyarakat menuju tatanan masyarakat sipil yang demokratis.

Maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Visi dan Misi INSIST' dan IRE sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan perberdayaan ?
2. Bagaimanakah Strategi INSIST' dan IRE dalam melakukan Pendidikan Politik kepada masyarakat sebagai sebuah usaha untuk melawan dominasi negara ?

3. Bagaimanakah Ruang Lingkup INSIST dan IRE dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai sebuah bentuk pemberdayaan ?
4. Bagaimanakah Rancangan Program serta Aksi dari INSIST dan IRE sebagai bentuk tindak lanjut dari ruang lingkup dalam melakukan pendidikan politik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan yang telah diajukan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui visi dan misi, Strategi, Ruang Lingkup, dari INSIST dan IRE sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.
2. Ingin mengetahui program-program aksi yang di miliki oleh INSIST dan IRE sebagai tindak lanjut dari usaha pemberdayaan masyarakat lewat Pendidikan Politik menuju sebuah tatanan masyarakat sipil yang demokratis

D. KERANGKA TEORI

Dalam sebuah proses Pendidikan Politik, yang mana hal ini terjadi sebagai sebuah reaksi keras terhadap sistim yang dengan sengaja mematikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan pendidikan politik maka akan kembali membuka kesadaran dan wawasan berpolitik warga negara agar warga negara dengan otonom untuk ikut berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun tak langsung dalam pengambilan keputusan secara politik.

Ada beberapa hal pokok atau landasan teoritik yang dapat di gunakan sebagai tolak ukur untuk membicarakan proses pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat untuk mengisi ruang publik dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis :

1. Demokrasi
2. Demokrasi Orde Baru
3. Pendidikan Politik
4. Masyarakat Sipil
5. Lembaga Swadaya Masyarakat

D.1 Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer tidak ada istilah lain yang sangat populer dalam wacana politik yang banyak dibicarakan orang-aktivis, politisi atau akademisi - melebihi istilah demokrasi. Istilah ini didambakan oleh semua orang terutama yang memiliki kesadaran politik, untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial politik masyarakat dalam sebuah negara.

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang banyak digunakan dalam sistim politik sebuah negara, namun istilah demokrasi sendiri menurut asal kata berarti "Rakyat Kuasa". Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan sebuah kehidupan berdemokrasi dalam sebuah sistim pemerintahan partisipasi rakyat merupakan sebuah kunci utama dalam melaksanakan sistim ini. Dengan kata lain sistim pemerintahan yang menganut sistim pemerintahan demokrasi, pemerintah

harus memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka (baca; rakyat) dalam organisasi politik serta organisasi sosial kemasyarakatan yang benar-benar lahir dari adanya sebuah kebutuhan dalam masyarakat.

Banyak teori yang mengatakan bahwa sesungguhnya demokrasi itu adalah rakyat atau *demos, populus*. Oleh karena itu selalu ditekankan bahwa peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan dalam dua tahap : *pertama, Agenda Setting* yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan, *kedua, deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan (Gaffar ;1999).

Menurut Robert Dahl (Gaffar;1999) dikatakan bahwa ada beberapa indikator untuk melihat atau menilai adakah sistim demokrasi dalam sebuah pemerintahan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah :

- a. *Akuntabilitas*. Dalam setiap demokrasi pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- b. *Rotasi Kekuasaan*. Dalam demokrasi, peluang akan jadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai.
- c. *Rekrutmen politik yang terbuka*. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistim rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi sebuah jabatan politik yang

dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetensi untuk mengisi jabatan tersebut.

- d. *Pemilihan Umum*. Dalam negara demokrasi pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hatinya. Dia bebas menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa rasa takut atau tekanan dari orang lain.
- e. *Menikmati hak-hak dasar*. Dalam suatu negara demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers secara bebas.

Dengan kata sistem politik yang demokratis adalah sebuah sistem politik di dasarkan pada kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian, rakyat diasumsikan paling sedikit sama kuat atau lebih dari pada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari pada rakyat biasanya akan terjadi sistem *otoriter*. Karena itu pengertian mendasar dari sistem politik yang demokratis adalah sistem yang didasarkan pada pertimbangan kekuatan politik yang nyata antara pemerintahan dan masyarakat (Budiman; 1996).

Rakyat pada bagian ini diibaratkan sebagai penentu dari berkembangnya kehidupan berpolitik artinya dalam setiap pengambilan keputusan, baik itu keputusan politik maupun yang lain peran rakyat haruslah di kedepankan. Dengan demikian apa yang akan terjadi dalam kehidupan bernegara benar-benar telah

menjadi sebuah perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat yang sudah tentu telah melewati proses penggodokan yang di lakukan oleh para wakil rakyat dalam parlemen.

D.2 Demokrasi Orde Baru

Di bawah kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kekuasaan dipusatkan di tangan eksekutif dengan cara meluas dan sistimatis sedangkan lembaga-lembaga lain dibiarkan lemah dan tergantung pada eksekutif (Arba MF (ed); 1998). Mau tidak mau kenyataan ini memperlemah tongak-tonggak demokrasi, karena peluang keikutsertaan dan pengaruh rakyat dalam kehidupan berpolitik bangsa sangat dibatasi. Berbagai undang-undang dan peraturan dibuat untuk membatasi kemandirian, partisipasi, dan peran kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

Berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat eksekutif serta menjamin keberlanjutan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dapat dengan jelas di tempuh dengan berbagai cara antara lain (Arba MF ed; 1998) :

1. Semakin memperluas peranan sosial-politik ABRI. Di bawah pemerintahan Orde Baru ABRI tampil sebagai kekuatan politik yang paling dominan. Dwi fungsi ABRI telah diterjemahkan secara fleksibel sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi kalangan ABRI untuk berperan di berbagai bidang non hankam. Keterlibatan ABRI tidak saja terjadi di bidang eksekutif namun juga

di bidang legislatif dan yudikatif dan berbagai kegiatan sosial ekonomi lainnya termasuk olah raga. Perluasan peranan dari ABRI sebagai sebuah kekuatan yang paling dominan mau tidak mau akan mempersempit ruang gerak masyarakat untuk bertindak lebih otonom dan mandiri karena ABRI merupakan kekuatan politik yang utama pihak esekutif yang sekaligus juga memiliki monopoli terhadap penggunaan kekerasan.

2. Menciptakan sistim pemilu yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan *Status Quo*. Pemilu yang pada dasarnya adalah memiliki tiga fungsi yaitu sebagai wahana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat, sebagai mekanisme untuk memberikan keabsahan pada pemerintah serta sebagai cara untuk untuk mendapatkan pergantian pemerintah yang teratur. Harus diakui bahwa selama pemerintahan Orde Baru pemilu belum dapat mewujudkan kedaulatan rakyat karena adanya berbagai peraturan yang membatasi kemungkinan rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas.
3. Menjadikan Golkar sebagai mesin politik pemerintah untuk mengumpulkan suara dalam pemilu yang didukung sepenuhnya oleh ABRI dan Korpri. Pegawai negeri yang tergabung dalam korpri mempunyai tuntutan moral untuk mendukung Golkar. Mendapat dukungan dari ABRI yang memainkan peranan sosial-politik dan korpri yang monoyal membuat Golkar mendapat dukungan monilitas secara *top down* karena fungsi dan fasilitas yang dimiliki kedua cabang eksekutif pendukung Golkar memiliki jangkauan sampai ke

desa-desa. Mobilisasi ini tentunya berbeda dari partisipasi rakyat menurut ideal demokrasi yang menekankan pada prinsip *botton-up*.

4. Membiarkan bidang legislatif dan yudikatif dalam posisi yang lemat dan subordinat pada cabang eksekutif. Sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, DPR sekarang ini relatif tidak memiliki kemandirian atau kemampuan untuk betul-betul menyuarakan aspirasi rakyat. Ini disebabkan antara lain oleh besarnya jumlah anggota yang diangkat (fraksi ABRI) yang merupakan bagian dari eksekutif, serta kurangnya kemandirian orsospol *vis-a-vis* pemerintah. Lebih dari itu para wakil terpilih yang duduk di DPR lebih tergantung pada orsospol dari pada rakyat yang memilih mereka.
5. Di bentuknya organisasi-organisasi korporatis yang ditunjukan untuk memobilisasi dan sekaligus dan mengendalikan berbagai bentuk kegiatan masyarakat oleh pemerintah, seperti kelompok buruh, tani, pemuda, wanita dan wartawan. Pemerintah sama sekali tidak dapat menerima organisasi-organisasi yang independen karena organisasi-organisasi yang demikian dapat mengrogoti kewibawaan pemerintah. Hal semacam ini dapat dilihat dengan jelas pada organisasi-organisasi perburuhan dan jurnalisme, karena dua sektor ini yang dianggap paling strategis untuk melawan pemerintah.
6. Diterapkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Masih diberlakukannya undang-undang anti-subversi, SIUP dan undang-undang yang membatasi gerak

langkah undang-undang LSM merupakan sebagian contoh dari hambatan-hambatan yang diciptakan pemerintah untuk mengendalikan dan membatasi partisipasi politik masyarakat.

Hal semacam ini yang telah diterapkan oleh Orde Baru dalam memformat kehidupan berpolitik warga negara. Ini menyebabkan masyarakat yang seharusnya dapat berperan sebagai subjek dari penyelenggara negara hanya menjadi penonton, karena seluruh ruang gerak masyarakat telah ditutupi oleh keotoriteran pemerintah Orde Baru.

D.3 Pendidikan Politik

Pendidikan politik atau yang sering disebut dengan *Political Forming* pada hakekatnya adalah sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Singkatnya pendidikan politik bagi warga negara adalah bentuk penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik (Khoiron dkk;1999).

Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa pendidikan politik yang dilakukan kepada warga negara merupakan sebuah bentuk pendidikan kepada masyarakat sebagai usaha untuk membebaskan rakyat dari bentuk-bentuk

penindasan yang dilakukan oleh negara. Karena dengan bentuk pendidikan yang membuka mata rakyat mengenai sebuah realitas sebenarnya maka akan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar baik pada diri maupun masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya pendidikan politik itu timbul merupakan sebuah model pendidikan yang kritis. Dalam Pendidikan Kritis ingin mempertanyakan tentang, *pertama* struktur ekonomi, politik, ideologi, gender, lingkungan, serta hak-hak asasi manusia dan kaitannya dengan pendidikan. *Kedua*, pendidikan untuk menyadari relasi pengetahuan sebagai kekuasaan yang menjadi bagian dari demokratisasi. Pendidikan dalam konteks itu tidaklah mentransformasikan struktur dan sistem dominasi, tetapi sekedar menciptakan agar sistem berjalan dengan baik. Dengan kata lain pendidikan justru menjadi bagian dari masalah dan gagal menjadi solusi.

Visi pendidikan yang coba ditawarkan adalah melakukan kritik terhadap sistem yang dominan sebagai kepedulian terhadap rakyat kecil dan tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru dan lebih adil. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisa secara lebih bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama dari pada pendidikan adalah untuk memanusiakan kembali manusia yang dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil. (Fakih dkk; 1999).

Sama halnya dengan apa yang di katakan oleh Paulo Freire, bagi *Freire* dengan filsafat pendidikannya yang di kenal dengan "Pendidikan Kaum Tertindas"

adalah pendidikan untuk pembebasan bukan untuk menindas (Freire;2000). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia dan karena itu secara metodologis bertumbuh diatas prinsip-prinsip aksi dan reaksi total. Artinya prinsip bertindak untuk mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran, realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas.

Pendidikan haruslah dapat menciptakan manusia yang bebas dan merdeka tanpa mendapat tekanan-tekanan dari luar diri manusia. Selain itu pula model pendidikan yang coba di tawarkan oleh Paulo Freire mencoba untuk menyadarkan kepada para pendidik bahwa pendidikan dapat membuat manusia kaget, mengapa ia takut, padahal kesadarannya menuntut agar ia berani untuk memperjuangkan hidupnya, mengapa ia menindas orang lain. Kesadaran menuntut kita harus saling mencintai dan hormat satu sama lain, ia akan menjadi manusia bahagia dalam masyarakat, dan pada akhirnya pendidikan harus membuat manusia bebas, tak mau di peralat lagi oleh kekuatan yang telah lama memperdayainya. Bentuk pendidikan macam itulah yang membuat manusia menjadi dirinya sendiri. (Basis no 01-02;2001).

Jadi pendidikan disini berperan sebagai sebuah sarana untuk menyelamatkan manusia dari ketidak berdayaannya ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang salalu menindasnya. Atau dengan kata lain pendidikan politik yang ditawarkan kepada masyarakat harus dapat benar-benar memberikan sebuah proses pemerdekaan masyarakat dari pembodohan-pembodohan yang

dilakukan oleh kekuasaan guna tetap mempertahankan kekuasaannya. Pendidikan politik juga harus dapat memberikan sebuah wacana kepada masyarakat yang tertindas agar mengetahui akan hak-hak dasar sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik.

D.4 Lembaga Swadaya Masyarakat

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah perubahan istilah dari istilah asing yaitu Non Government Organisation (NGO) yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Organisasi Non Pemerintah (ORNOP). Perubahan istilah ini semata-mata dilakukan karena, di satu sisi istilah ORNOP memiliki konotasi negatif, yaitu seakan-akan sebagai lawan dari pemerintah, dikalangan aktivis saat itu ada kesadaran bahwa gerakan mereka ini dilandasi dengan satu misi positif yakni mengembangkan kemandirian dan membangun keswadayaan masyarakat.

Menurut *Aswad Mahasin* (Saragih;1995) awal tahun 1970-an merupakan tahun kelahiran LSM di Indonesia pada sebuah lokakarya yang di adakan oleh Bina Desa, April 1978 di Unggaran. Lembaga Swadaya masyarakat ini merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki keprihatinan sosial. Pada dasarnya mereka ingin melakukan sesuatu untuk kelompok masyarakat yang tertinggal oleh derapnya laju pembangunan. Kritik utama mereka tujukan pada pola pembangunan yang bersifat sentralistis, non partisipatif dan terlalu menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menimbulkan dampak-dampak tidak manusiawi

seperti ketimpangan ekonomi (kaya-Miskin), ketimpangan pembangunan desa-kota dan Jawa dan luar Jawa. Sebagai respon terhadap keprihatinan ini maka mereka (LSM) mulai melakukan pendampingan di masyarakat dengan konsep-konsep alternatif.

Proses pendampingan berarti mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan pertemanan atau persahabatan. Hubungan tersebut adalah hubungan antara dua subyek yang dialogis, serta yang menjadi objek adalah keluhan, kebutuhan, masalah dari kelompok dampingan. Pada awalnya LSM mendampingi kelompok binaan adalah sebuah proses pemecahan masalah pembangunan yang mereka hadapi. Namun pada perkembangan selanjutnya melakukan proses pemandirian dan demokratisasi bagi warga negara.

Bentuk pendampingan sosial adalah suatu strategi antara lain untuk mengembangkan partisipasi masyarakat, sasarannya adalah untuk menuju kemandirian. Swadaya berarti mendasarkan sesuatu terutama kekuatan sendiri dan bantuan dari luar bersifat tambahan bukan sesuatu yang pokok. Mandiri disini berarti mampu memilih, menentukan, dan memutuskan sendiri apa yang baik untuk di buat.

Untuk itu kemandirian dalam mengambil keputusan yang menyangkut diri masyarakat maupun individu merupakan salah satu cita-cita dari LSM. Cita-cita LSM tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : menumbuhkan keswadayaan masyarakat menuju dunia yang lebih manusiawi dan demokratis. Segala bentuk penindasan harus dapat dihapuskan. Oleh karena itu dengan melihat cita-cita yang

dirumuskan ini maka dapat dikatakan bahwa LSM Indonesia berusaha untuk menciptakan sebuah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan demokratis.

Dalam perkembangannya LSM Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan yang selama dua dasa warsa telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia yang meletakkan kerangka pembangunan modernisasi sebagai dasar, yang mana model ini menerapkan model pembangunan pertumbuhan. Pendekatan model pembangunan ini adalah strategi dan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang memberi perhatian khusus kepada tingkat tabungan dan investasi serta indentitas modal dengan tehnologi moderen. Strategi dan kebijakan ini mengasumsikan bahwa industrialisasi yang cepat dan perluasaan sektor moderen pada umumnya adalah jawaban terbaik bagi kebutuhan pembangunan ekonomi yang cepat dan penciptaan lowongan kerja. Model pertumbuhan ini diterapkan baik di sektor industrialisasi perkoataan maupun sektor pertanian. Sebagai contoh kebijakan pertanian pedesaan diwujudkan melalui revolusi hijau (Fakih;1996).

Revolusi hijau dan proyek industrialisasi perkotaan menjadi pokok bahasan kritisisme oleh kalangan aktivis LSM. Keterlibatan LSM yang begitu meningkat dengan pesat semenjak dasa warsa 70-an punya keterkaitan dengan kritisme ini atas strategi pembangunan yang merupakan reaksi bagi pendekatan pemerintah terhadap pembangunan yang di anggap tidak memadai, khususnya dalam pengetian metodologis dan teknis. Kegagalan pemerintah yang dirasakan untuk mengembangkan pembangunan secara efektif atau menaikkan standart hidup

kaum miskin dan jumlah keuangan yang belum pernah terjadi disalurkan melalui LSM. Celakanya hanya sedikit LSM yang benar-benar mempertanyakan ideologi dan paradigma developmentarisme dan modernisasi.

Beberapa kontradiksi dan ketidakjelasan yang besar di kalangan komunitas LSM Indonesia dalam menghadapi model pembangunan pertumbuhan. Banyak aktivis LSM Indonesia yang dimotifasi oleh cita-cita politik dan pelayanan. Namun banyak di antara mereka tampak sangat tidak jelas tentang bagaimana program pembangunan yang di anggap benar menghasilkan transformasi struktur makro politik. Juga jelas sekali kebingungan ideologis yang sangat besar dalam tujuan dasar seperti pengembangan “kemandirian“ dengan analisis ketergantungan. Bahkan sebagian besar di antara mereka memiliki kesamaan asumsi dengan teori modernisasi Mc Clelland.

Karena organisasi-organisasi tersebut menggambarkan teori pembangunan berdasarkan ideologi pembangunan maka perlu meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan menjadi tema utama. LSM cenderung tidak mempersoalkan struktur yang ada dan hegemoni yang dominan. Korupsi dalam pemerintahan dipandang sebagai sebab fundamental dari keterbelakangan. Berkenaan dengan paradigma model modernisasi, mereka yakin keterbelakangan mayoritas rakyat disebabkan oleh adanya sesuatu yang keliru dalam mentalitas dan nilai-nilai rakyat. Mentalitas keterbelakangan dan nilai yang terbelakang ini dianggap sebagai sebab utama dan dampak lemahnya “partisipasi” rakyat dalam pembangunan. (Fakih;1996)

Isu swadaya dan koperasi adalah tema utama dari tipe LSM ini tidak dianggap sebagai nilai fundamental tetapi diakui sebagai pendekatan motifasi rakyat agar terlibat dalam pembagungan yang dibawa oleh LSM. Berbagai usaha untuk mengubah mentalitas “terbelakang” menjadi wiraswasta moderen, sebagaimana rakyat dalam masyarakat yang berpestasi. Maka tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia yang adalah salah satu dari negara dunia ketiga yang mengimplementasikan modernisme *developmentaris* memakai gagasan ini sebagai salah satu program dari pembangunan.

D.4.1 Posisi LSM dalam Negara

LSM Indonesia terkadang sangat sulit untuk memposisikan dirinya di dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Ada berbagai masalah internal yang seharusnya menjadi agenda penting bagi setiap LSM Indonesia untuk menempatkan posisinya sebagai sebuah kelompok pengimbang kekuatan negara. Ada berbagai masalah yang dapat dilihat dari sikap LSM terhadap pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan yang hendak diambil oleh pemerintah, sebagai contoh berangkat dari kecendrungan pemerintah sebagai aktor utama dalam pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Untuk itu LSM harus benar-benar dapat memposisikan dirinya sebagai sebuah lembaga yang kritis untuk memahami setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam konteks pembangunan Indonesia Pemerintah sering memandang LSM mengancam kedudukannya, sebagai contoh pemerintah enggan membantu kegiatan LBH dalam memberi bantuan hukum kepada orang-orang miskin karena kegiatan LBH telah menimbulkan keberanian warga negara bahkan orang miskin sekalipun untuk berhadapan dengan pejabat-pejabat daerah dalam mempertahankan haknya. Namun pada bagian lain kerja sama antara LSM dan pemerintah terbentuk jika program atau kegiatan LSM sejalan dengan program pemerintah, misalnya WALHI ikut merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan hutan tropis atau program sungai bersih.

Eldridge (1984;41) pada intinya mengelompokan tiga jenis pendekatan yang dilakukan oleh LSM dalam jalinan hubungan dengan pemerintah. *Pertama*, LSM mempunyai hubungan yang dekat dengan pemerintah. Hubungan tersebut di wujudkan dalam bentuk dalam bentuk kerja sama dalam program pembangunan pemerintah. *Kedua*, meskipun tidak bekerja sama dengan pemerintah LSM tetap mempunyai hubungan baik dengan pemerintah. *Ketiga*, LSM menjalani kontrak minimum dengan badan-badan pemerintah serta kurang bergantung pada upaya persuasif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan tetapi lebih menekankan pada pentingnya kemandirian kelompok. Hubungan dengan pemerintah juga dipengaruhi oleh kegiatan yang berpusat dengan kekuasaan. LSM akan mampu membina hubungan yang baik dengan pemerintah akan menjadi aspek yang penting dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini LSM

menghadapi tantangan untuk mengakomodasikan kepentingannya dengan pemerintah sambil tetap mempertahankan kemandiriannya.

Bentuk hubungan antara LSM dengan pemerintah memang sangar kompleks. Kadang-kadang bekerja sama, kadang-kadang konflik atau bisa saja keduanya terjadi pada saat yang sama bergantung pada isu atau masalah yang dihadapi. Dari sini dapat kita lihat bahwa yang diharapkan oleh pemerintah adalah LSM melakukan tidak konfrontasi dengan pemerintah, melainkan harus bekerjasama.

Namun ketika kita melihat konteks perkembangan dari LSM yang mengalami banyak perubahan terutama seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin baik. Banyak sekali ketegangan-ketegangan yang timbul antara LSM dengan Pemerintah terutama ketika LSM menggunakan teori-teori yang berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh pemerintah, terutama bagi LSM yang mengutamakan partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan demokratisasi (Clark Jhon;1995). Pemerintah sangat berhati-hati terhadap LSM semacam ini karena disatu pihak mereka memahami nilai ekonomis proyek mereka, tetapi di lain pihak mereka melihat bahwa elemen pemberdayaan itu sebagai salah satu penghambat.

LSM yang progresif melihat pemerintah sebagai bagian dari masalah dikuasai oleh elit, bias terhadap pemecahan dunia pertama korup dan anti pemberdayaan. Masalah semacam ini terdapat pada rezim yang pertama ditandai dengan menampilkan orang miskin sebagai subjek ketidakadilan kapitalisme

internasional dan mengorbankan kepentingan mereka semata-mata demi mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi negara dalam rezim yang kedua tidak dikatakan sebagai masalah politik, melainkan ekonomi, kekuatan monopoli, keahlian dan teknologi yang melayani kepentingan segelintir orang saja.

Meski tidak mengubah analisis, kebanyakan dari LSM ini mengubah strategi mereka dalam menjalin hubungan dengan pemerintah. Hal ini bukanlah merupakan kelemahan melainkan kekuatan : menemukan analisis politik memungkinkan LSM melihat bagaimana kebijaksanaan pemerintah secara sengaja kurang teliti bertentangan dengan atau hanya mementingkan pencapaian tujuan mereka. Dengan meningkatnya kesadaran diri tidak berarti LSM mengingkari derajat pembangunan alternatif yang di tawarkan.

Oposisi terhadap pemerintah berarti menggunakan saluran yang ada untuk merintangi setiap rencana pemerintah yang berdampak negatif bagi orang miskin. Hal ini juga berarti mengorganisir tindakan protes, menggunakan pengadilan untuk menentang keputusan-keputusan resmi, bersatu dengan kekuatan oposisi politik atau gerakan massa seperti serikat buruh, media massa yang tersebar luas serta saluran-saluran komunikasi tidak resmi lainnya.

D.4.2 LSM dan Pendidikan Kritis

Dengan munculnya kesadaran kritis dari berbagai kalangan aktivis LSM dengan melihat berbagai macam permasalahan yang timbul di dalam konteks masyarakat yang semakin hari semakin baik maka para aktivis LSM dengan melihat permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berdemokrasi perlu untuk mengubah visi dan paradigma perjuangan yang lebih jelas bagi perubahan dalam masyarakat.

Salah satu cara untuk dapat mengubah bentuk perjuangan adalah dengan cara mengubah paradigma lama yang dimiliki oleh gerakan LSM dengan sebuah paradigma transformatif. Kritik-kritik terhadap pembangunan dan modernisasi akan menjadi tema utama dalam paradigma yang transformatif untuk membuat perubahan.

Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh gerakan LSM dalam mengubah tipe organisasi menjadi tipe organisasi gerakan sosial yang transformatif. *Pertama*, sejauh manakah mereka dapat mengubah dan menciptakan ruang guna mengartikulasikan paradigmanya di bawah pengaruh hegemoni pembangunan. Hegemoni ini sangat mempengaruhi gerakan LSM yang membentuk keseluruhan selera aktivis maupun rakyat. Pembangunan membentuk cara aktivis mendefinisikan, menganalisis dan menanggapi masalah. Dengan demikian pengaruh hegemoni, modernisasi dan pembangunan sangat meresap dan menjadi bagian yang melekat erat dalam semangat gerakan LSM.

Kedua, sejauh manakah mereka dapat menciptakan ruang untuk melahirkan kesadaran kritis di dalam jaringan LSM sendiri maupun rakyat yang adalah partisipan program mereka, yang dikarenakan adanya pengaruh dan kontrol yang kuat dari aparat pembangunan yang di dukung oleh negara untuk menghentikan pemikiran dan ideologi alternatif apapun. *Ketiga*, bagaimana komitmen mereka terhadap paradigma dihadapan lembaga dana yang berkerja di Indonesia. Karana pada umumnya lembaga dana juga adalah pendukung modernisasi dan pembangunan. *Keempat*, sejauh manakah mereka dapat keluar dari hubungan antara LSM besar dan LSM kecil. Ada kecendrungan kuat bahwa LSM besar mendukung status quo dan mereka tidak berani untuk mengambil resiko karena sulit bagi mereka untuk benar-benar berubah.

Kelima, seberapa banyak mereka dapat keluar dari proses alienasi dengan rakyat? Ada kecenderungan kuat yang menunjukkan bahwa LSM di Indonesia terjauhkan dari rakyat di tingkat akar rumput. Hal ini disebabkan karena posisi ideologis mereka yakni Developmentalisme, menempatkan mereka tidak sadar sebagai bagian dari negara. Posisi ini menyulitkan mereka menjadi bagian dari gerakan rakyat. *Keenam*, sejauh mana mereka dapat memecahkan masalah masalah-masalah manajemen baik di dalam maupun di luar organisasi. Masalah manajemen internal meyangkut bagaimana mencipta manajemen yang demokratis dan partisipatif dalam pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tubuh LSM sendiri untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang lebih demokratis dalam

artian menciptakan atau melahirkan masyarakat sipil dengan melihat bagaimana rakyat dapat mengembangkan gagasan-gagasan mereka sendiri tentang perubahan sosial maka diperlukan berbagai perubahan dalam tubuh LSM. Salah satu bentuk untuk menumbuhkan kesadaran kritis yang dimiliki oleh masyarakat adalah dengan program pendampingan atau pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka dapat keluar konsep hegemoni pembangunan dan modernisasi.

Konsep hegemoni digunakan dalam konteks dominasi kultural, moral terhadap kelompok-kelompok atau kelas yang tersisihkan dan sub-ordinat. Konsep hegemoni juga digunakan dengan formasi daerah ideologi baru, dengan politik, kultural dan kepemimpinan moral dan dengan suka rela. Setiap individu dibentuk oleh gagasan hegemonik modernisme dan lingkungan kesejajarannya. Dalam konteks ini LSM sebagai gerakan kontra hegemoni adalah memperkuat masyarakat sipil dan membantu mereka melahirkan sebuah kesadaran kritis.

Untuk dapat melahirkan sebuah kesadaran kritis dalam masyarakat yang benar-benar lahir dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri maka diperlukan sebuah bentuk pendampingan yang benar-benar menimbulkan kesadaran kritis kepada masyarakat. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistim dan struktur sebagai sumber masalah. Bentuk pendampingan tersebut adalah dengan cara melakukan pendidikan kritis.

Pendidikan kritis adalah media untuk membantu rakyat dalam membangun sejarah mereka sendiri dan resistensi terhadap kekuatan dan ideologi yang menindas mereka (Fakih;1996). Tujuan dari Pendidikan Kritis adalah

menciptakan kesadaran kritis di kalangan rakyat dan mentransformasikan kesadaran palsu mereka kepada kesadaran kritis. Paradigma kritis dalam pendidikan melatih rakyat untuk mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur yang ada.

Dalam Pendidikan Kritis urusan pendidikan adalah melakukan refleksi terhadap ideologi dominan kearah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang kritis terhadap sistim dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekontruksi serta advokasi menuju sistim sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin untuk bersikap netral, bersikap objektif maupun bergerak dalam masyarakat seperti anjuran positivisme. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistim yang dominan sebagai pemihakan kepada rakyat kecil dan tertindas untuk menciptakan sistim sosial baru dan lebih adil. Dalam prespektif kritis pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistim dan struktur yang tidak adil.

D.5 Civil Society

Konsep *Civil Society* bukan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, dalam bukunya Muhamad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Hikam mengatakan bahwa gagasan yang awalnya lahir dari sejarah lahirnya *Civil Society* dapat kita telusuri melalui jaman Aristoteles. Namun pada perkembangannya konsep *Civil Society* ini mengalami perubahan makna sejalan dengan proses pembentukan formasi sosial dan perubahan struktur politik. Hikam juga mencatat *Civil Society* barulah mulai dipahami sebagai entitas yang berbeda dari negara. Perbedaan inilah yang membawa perdebatan hingga saat ini.

Civil Society menurut Muhamad AS Hikam (1997) harus dapat dibedakan dengan pengelompokan-pengelompokan sosial yang bersifat politik lain seperti terwujudnya kesukuan (etnisitas), klan, atau jaringan-jaringan klientalisme, karena variabel utama adalah Otonomi (kemandirian), public, dan civil sesuatu yang nistaya demokrasi bagi masyarakat seperti kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta berkesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan di depan umum.

Dalam pengertian inilah kemudian *Civil Society* merupakan sebuah entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas seperti yang diungkapkan oleh **Marx** serta memiliki kapasitas politik yang tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan mengimbang dari kecenderungan intervensionis negara, dan pada saat yang sama mampu pula menjadi kekuatan reflektif kritis tidak hanya terhadap lingkungan eksternalnya tetapi juga dirinya sendiri.

Bagi Gramsci pengertian *Civil Society* hampir sama dengan pengertian yang di kemukakan oleh Marx, hanya perbedaannya terletak pada memposisikan *Civil Society* bukan pada *basic material* namun terletak pada tataran struktural, sebagai wadah kompetisi untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan. Peran *Civil Society* pada konteks yang demikian yang bagi Gramsci disebut sebagai kelompok pengimbang di luar kekuatan negara.

Kehadiran *Civil Society* sendiri sebenarnya sebagai masyarakat yang mandiri, terikat pada intreraksinya dengan negara, karena itu harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut kemajuan dan kemunduran perkembangannya, dalam arti perkembangan dan keberadaan *Civil Society* itu kuat disebabkan melemahnya posisi negara namun dapat sebaliknya posisi *Civil Society* itu lemah sebagai akibat dari adanya kontrol negara yang begitu kuat dalam artian posisi *Civil Society* itu lemah.

Dari sini sudah jelas dapat kita lihat bahwa keberadaan masyarakat sipil dalam proses demokratisasi sangat penting. Karena masyarakat sipil sebagai sebuah komunitas masyarakat yang bebas terhadap pengaruh negara maka bagi sistim politik manapun masyarakat yang demokratis keberadaannya merupakan prasyarat penting, oleh karena itu perbincangan mengenai masyarakat sipil tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari proses demokrasi.

Dalam wacana demokratisasi *civil society* dan demokrasi ibaratnya "*the two side at the same coin*". Artinya jika *civil society* kuat maka demokrasi akan bertumbuh

dan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baik, *civil society* akan bertumbuh dengan baik pula.

Berdasarkan uraian teori di atas maka, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimanakah **Model Pendidikan Politik yang di kembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat demi terbentuknya masyarakat sipil yang demokratis**. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti mencoba untuk melihat LSM yang akan di teliti lewat 4 bagian yang dengan sendirinya dapat mewujudkan bentuk dari LSM tersebut, ke empat bagian tersebut adalah :

1. Visi dan Misi, yang di miliki Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mencerminkan ciri serta bentuk dari lembaga swadaya masyarakat.
2. Strategi, yang di miliki oleh masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari visi dan misi yang dimiliki.
3. Ruang Lingkup, yang di miliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai implementasi dari strategi yang telah di tetapkan sebelumnya.
4. Program Aksi, pada dimensi ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam setiap program pendidikan politik yang telah di lakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai usaha pemberdayaan kepada masyarakat.

Untuk mencapai apa hal tersebut peneliti menggunakan dua Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menjadi bahan kajiannya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kedua Lembaga tersebut adalah *Institute for Social Transformation (INSIST)* dan *Institute for Research and Empowerment (IRE)*.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang lebih jauh melihat bagaimanakah model Pendidikan Politik yang diberikan oleh LSM kepada Masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, hal ini menunjukkan banyak sekali permasalahan yang kompleks di dalam tema tersebut. Adanya kompleksitas inilah menyebabkan peneliti menggunakan metode **Kualitatif**, sebab dengan menggunakan metode kualitatif dapat digunakan untuk menentukan serta memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena mengenai model pendidikan politik yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagai cara untuk membebaskan masyarakat dari dominasi yang diberikan oleh negara.

Metode kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan. Fenomena sosial kemasyarakatan inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini memang terkadang sulit untuk dipahami serta dapat menjelaskan secara terperinci dengan menggunakan angka atau menggunakan metode kuantitatif yang bersifat ilmiah.

Secara ilmiah pengertian dari penelitian kualitatif mengandung pengertian yang coba diungkapkan oleh **Bogdan dan Taylor** :

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati oleh mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). (Maleong;1998;43)

Lain halnya dengan pengertian yang diungkapkan oleh Krik dan Miler bahwa :

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. (Maleong;1998;21)

Penelitian kualitatif digunakan dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif dengan mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan dengan banyak penemuan pengaruh bersama dan terdapat pola-pola yang dihadapi.

Dengan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada cara-cara pengumpulan data yang berbeda, melalui penelitian lapangan, wawancara mendalam, serta tinjauan pustaka yang memungkinkan peneliti mendapat informasi dari pelaku mengenai masalah model pendidikan politik yang diberikan oleh LSM kepada masyarakat.

F. OBJEK PENELITIAN DAN UNIT ANALISA

F.1 Obyek Penelitian

Pada penelitian ini objek yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah : *Institute for Social Transformation (INSIST)* dan *Institute for Research and Emporwerment (IRE)*, karena dalam melakukan penelitian mengenai model pendidikan politik LSM peneliti harus memilih LSM yang memiliki program pendidikan politik atas dasar ini kemudian peneliti memilih kedua LSM ini yang memiliki program pendidikan politik dan hal ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan terhadap masyarakat, dengan melihat tidak hanya satu LSM penulis mengharapkan dapat mendapatkan mencari model mengenai pendidikan politik ideal yang selama ini coba dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

F.2 Unit Analisa

Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas bagaimanakah Model Pendidikan Politik yang di kembangkan oleh INSIST dan IRE sebagai usaha untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Selain itu peneliti membatasi pada bentuk program pendidikan politik yang bagi aktifis IRE maupun INSIST merupakan program pendidikan politik ideal untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan ditentukan pula waktu pasca keruntuhan rezim orde baru.

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

G.1 Wawancara mendalam (*In-depth interview*).

Dalam menggunakan teknik wawancara mendalam ini peneliti mencoba untuk mewawancarai nara sumber atau responden yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Orang Inti* yang termasuk dalam orang inti disini adalah orang-orang atau para aktivis LSM yang duduk dalam jabatan-jabatan struktural di INSIST maupun IRE. Dalam wawancara ini peneliti mencoba untuk mencari pendapat mereka tentang bagaimanakah Visi dan Misi, Strategi, Ruang Lingkup, dan program pendidikan politik yang merupakan penjabaran dari sebuah proses pemberdayaan.
- 2: *Aktivis LSM (Volunteer)*, selain melakukan wawancara kepada orang inti peneliti mencoba untuk mewawancarai para volenteer dari INSIST dan IRE yang menjalankan program pendidikan politik kepada masyarakat, dalam hal ini peneliti ingin mencari sampai sejauh mana mereka memahami Model Pendidikan Politik. Salain ingin mencari sampai seberapa jauh mereka memahami mengenai model pendidikan politik, peneliti juga ingin mendengar berbagai kendala yang dihadapi oleh para aktivis (volenteer) dalam menjalankan program pendidikan politik di lapangan

Dengan menggunakan wawancara mendalam kepada orang kunci *Key Person* dari orang inti maupun aktivis, hal ini kemudian dilengkapi dengan menggunakan metode *Snowballing Sampling* yaitu informan yang diminta untuk menunjukan informan lain yang bisa melengkapi dan memberikan tambahan informasi yang telah diberikan oleh informan pertama peneliti akan memperoleh data semaksimal mungkin guna untuk menjawab pertanyaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

G.2 Dokumentasi

Proses pencarian data dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen berwujud tulisan, rekaman dan hasil evaluasi kegiatan program Pendidikan Politik yang telah dijalankan oleh INSIST dan IRE.

G.3 Pustaka

Untuk melengkapi data-data yang peneliti peroleh guna menganalisa data dari hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi penulis mencoba melengkapi data-data tersebut dengan menggali dari berbagai referensi yang mengulas tentang pendidikan politik, LSM, serta Masyarakat Sipil yang nantinya data tersebut dapat menguatkan data yang sudah ada secara teoritis guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

H. ANALISA HASIL PENELITIAN

Dari data-data yang diperoleh lewat wawancara, dokumentasi maupun pustaka kemudian peneliti mencoba menganalisa lewat teori-teori yang ada guna menjawab masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat mencari bagaimanakah solusi untuk menciptakan masyarakat sipil di Indonesia lewat perjuangan yang dilakukan oleh LSM sebagai sebuah organisasi penekanan bagi pemerintah.

